

## IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM INFORMASI PASAR TENAGA KERJA (SISTEMA INFORMASIAUN MERKADU TRABALHU)

**Antonio da Paixão Soares Pereira, Abdul Hakim, Suryadi**

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Jl. MT. Haryono 163 Malang

Email : antonioricelaluz@gmail.com

**Abstrak:** Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja ialah penjabaran dari pada tupoksi dari Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan yang termuat didalam Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan mendiskripsikan, dan menganalisis implementasi Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) di Departemen Orientasi Profesional dan Pekerjaan dengan menggunakan analisis model implementasi Edward III. Hasil dari penelitian ini bahwa, komunikasi yang dijalankan dalam implementasian program “SIMU” belum berjalan secara efektif karena daya tanggap dari beberapa implementor program terhadap perintah atasannya belum berjalan baik. Sumber Daya yang ada yaitu sumber daya finansial dan sumber daya material berupa sarana dan prasarana sudah cukup memadai dalam mendukung pengimplementasian program “SIMU” akan tetapi untuk sumber daya manusia masih kurang baik dalam kuantitas maupun kualitas. Disposisi atau sikap dari para implementor dalam program ini memiliki komitmen yang sangat tinggi. Dalam pengimplementasian program “SIMU” ini belum ada standard kerja yang jelas berupa Standard Operating Procedur (SOP) yang merupakan tolak ukur didalam keberhasilan suatu program yang dijalankan.

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi, Tenaga Kerja.

**Abstact:** Labor Market System Information Program is the elaboration of the main duty and function of National Division of Job and Professional Orientation pursuant to Government Regulation No.3/2008. Research method is qualitative, and the objective of research is to describe and to analyze the implementation of Labor Market System Information (SIMU) using the analytical model of implementation suggested by Edward III. Result of research has shown that the communication during the implementation of “SIMU” Program is not yet effective because some implementers of this program are not responsive to the command from their superior. The resources, such as financial resource and material resource including structure and infrastructure, are already quite reliable to support the implementation of “SIMU” Program but quantity and quality of human resource seem poor. However, disposition and attitude are not problematic because program implementers are highly committed to the program. But, the implementation of “SIMU” Program does not have a clearly defined work standard, such as Standard Operating Procedure (SOP), whereas this standard is a yardstick to the success of a program.

**Keywords :** Policy Implementation, Information System, Labor.

### PENDAHULUAN

Administrasi Publik dalam perkembangannya banyak mengalami perubahan (reformasi). Zauhar (2012: 4) mengungkapkan reformasi administrasi merupakan bagian penting dalam pembangunan di negara-negara berkembang, terlepas dari tingkat perkembangan ataupun kecepatan pertumbuhan dan arah serta tujuannya. Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam pelayanan dapat di implemmentasikan dalam sebuah organisasi yang dilakukan oleh manusia (*human being*) yang bertindak selaku aktor atau peserta dalam organisasi yang bersangkutan dengan memiliki kinerja (*performance*). Sehubungan dengan hal pemberian pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada masyarakat merupakan suatu perwujudan tugas pokok dan fungsi dari apatur negara sebagai pelayan masyarakat disamping

sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah yang tentunya sebagai aktor utama/pelaku dalam pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban sebagai pengarah, pembimbing serta menciptakan suasana yang mendukung/menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Sehingga peraturan pemerintah ketika di tetapkan menangani tugas pokok dan fungsi sebagai landasan para pegawai untuk menjalankan suatu kegiatan pekerjaan yang tertuang dalam menjalankan proses dalam implementasi. Menurut Howleyt dan Ramesh (1995) yang dikutip oleh Muatirin dan Zaenudin (2014: 20) mendefinisikan implemementasi kebijakan sebagai *“the process whereby programs or policies are carried out; it donates the translation of plans into practice.* (implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan program-program atau kebijakan-kebijakan, yang merupakan upaya penterjemahan dari rencana kedalam praktek). Penjelasan tersebut bahwasanya ketika sudah ditetapkan kebijakan sebuah program untuk interpretatifkan dalam proses implementasi hal yang dilakukan yakni program tersebut tercapai sesuai apa yang diharapkan. Implementasi Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) pada Sekretariat Negara Urusan Pelatihan Profesional dan Pekerjaan dalam hal ini Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan yang merupakan salah satu intitusi/lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik dalam bidang ketenagakerjaan yang diatur dalam Dekrit No.3/2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/2007 pada pasal 37 tanggal 5 September 2007, yaitu dimana setelah terbentuknya Pemerintahan Konstitusional IV Republik Demokratik Timor Leste.

Sekretariat Negara Urusan Pelatihan Profesional dan Pekerjaan (SEFOPE) ini dibentuk untuk menjamin semua pelaksanaan aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan pengembangan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan untuk menciptakan sumber daya manusia Timor Leste yang professional, menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, mencari dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang masalah ketenagakerjaan sesuai dengan decreto Lei No. 7 / 2007, pasal 1 yang berbunyi (*Como orgão central do governo, em apoio a todas as politicas desenvolvidas no âmbito de suas competências, deve desenvolver e implementar politicas e programas na area do trabalho, formação, profesonal e emprego*). Yang artinya sebagai pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan program untuk bidang pekerjaan, pelatihan profesional dan ketenagakerjaan) Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi daripada masing-masing Divisi yang ada pada Sekretariat Negara Urusan Pelatihan Profesional dan Pekerjaan. Dari peraturan yang ada tersebut maka lahir beberapa program dimana salah satu program itu adalah Program SIMU (Sistema Informasi Pasar Tenaga Kerja). Peraturan Pemerintah ini menjadi suatu acuan kepada Divisi Nasional Orientasi Profesional untuk bertanggung jawab dalam mengimplementasikan program tersebut, salah satunya memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja dalam mencari informasi lowongan pekerjaan dan informasi kursus pelatihan keterampilan secara profesional dalam arti pelayanan yang diberikan itu harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari penerima pelayanan (calon tenaga kerja).

Pada umumnya penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini implementasi dari program sistema informasi pasar tenaga kerja merupakan salah satu masalah yang menjadi problematika dalam kehidupan masyarakat di Timor Leste. Pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang meliputi masalah pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil dan kebutuhan yang mendasar dari masyarakat pencari kerja. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini pencari kerja dalam mendapatkan informasi mengenai kursus pelatihan keterampilan dan informasi lowongan pekerjaan maka Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan melalui Departemen Orientasi Profesional dan Pekerjaan melaksanakan Program “SIMU” untuk menjawab permasalahan yang ada.

Negara Timor Leste mencapai 17% dari jumlah penduduk di timor leste. Sementara yang mendapatkan pekerjaan berjumlah 1632 jiwa dan kisaran 11% dari total jumlah penduduk yang ada. Sedangkan pada tahun 2013 dalam kantor SEPFOPE hanya 137 perusahaan yang terdaftar dalam menampung tenaga kerja sebanyak 465 orang. Hal ini perlunya pemerintah dalam ini SEPFOPE untuk dapat melakukan koordinasi interministerial maupun lintas sektoral untuk dapat menyalurkan masyarakat pencari kerja. Tentunya Divisi Nasional Orientasi dan pekerjaan perlu berupaya untuk memaksimalkan pelaksanaan Program “SIMU” dengan pemberian pelatihan kepada para implementor program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut. Salah satu tugas pokok dan fungsi aparat birokrasi pada Sekretariat Negara urusan Pelatihan Profesional dan Pekerjaan khususnya Divisi Nasional Orientasi dan Pekerjaan adalah melayani masyarakat pencari kerja secara profesional berlandaskan pada visi dan misi dari pada Sekretariat Negara urusan Pelatihan Profesional dan Pekerjaan yaitu ”Memberikan Pelatihan Profesional dan mempromosikan kepada para penyalur pekerjaan baik dalam negeri maupun luar negeri”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis pendekatan secara kualitatif mengenai Implementasi Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja “SIMU” di Departemen Orientasi Profesional dan Pekerjaan dalam menyalurkan calon tenaga kerja yang mencari kursus pelatihan profesional dan mencari pekerjaan. Adapun lokasi Penelitian dilakukan yakni di Divisi Nasional Orientasi dan Pekerjaan Timor Leste. Serta sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan dan dokumen serta teknik pengumpulan data yang dilakukan diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang telah dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014), memiliki tiga komponen diantaranya yakni : kondensasi data, penyajian data, dan menarik suatu kesimpulan/ verifikasi. Sedangkan mengenai keabsahan data dapat dilakukan melalui empat kriteria yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam penelitian Implementasi program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja di Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan, yang menggunakan model yang dikembangkan oleh Edward III (1980) yang dikutip Widodo (2012) yang menjelaskan empat faktor diantaranya Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

### **Komunikasi**

Dalam proses komunikasi dalam implementasi program menjadi suatu hal yang terpenting, hal ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pelaksanaan program yang dijalankan mendapatkan umpan balik yang baik antara para pelaksana. Makna dari komunikasi yakni penyampaian pesan antara komunikator pada komunikan terhadap suatu informasi guna melahirkan umpan balik serta menyerap informasi tersebut terkait pelaksanaan program yang menjadi tanggungjawab bersama. Komunikasi yang dijalankan berkenaan dengan bagaimana suatu organisasi terhadap sikap dan tanggapan mereka terlibat dalam proses implementasi program. Komunikasi menunjukkan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, komunikasi yang dimaksud yakni pemberian perintah dari atasan terhadap pelaksana program agar penerapannya dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan dan tidak keluar dari pada sasaran yang telah menjadi kesepakatan bersama. Demikian komunikasi yang dijalankan harus tepat dan jelas. Menurut Edward III dalam Winarno (2014) dalam proses

komunikasi kebijakan tiga hal yang terpenting dalam proses komunikasi yaitu transformasi informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi. Sebuah komunikasi yang baik akan membawa perubahan dalam sebuah program yang dijalankan, dengan kejelasan dari informasi memungkinkan pelaksanaan perintah dapat dilakukan secara cermat dan mudah dipahami yang tidak menimbulkan interpretasi dari implementasi program. Dimana program yang dijalankan bertujuan guna mengetahui jumlah pencari kerja yang ingin mencari informasi tentang lowongan pekerjaan ataupun kursus keterampilan serta memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang baik kepada masyarakat baik dari proses pendaftaran hingga pada proses penyaluran tenaga siap pakai kepihak perusahaan atau *company*. Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) di seponsori oleh agensi internasional (ILO) yang bekerjasama dengan Sekretariat Negara urusan Pelatihan Profesional dan Ketenagakerjaan Timor Leste melalui Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan Timor Leste.

Dari penjelasan tersebut bahwa fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) Di Divisi Nasional Orientasi Profesional Dan Pekerjaan Timor Leste terutama para pegawai departemen orientasi profesional sikap dalam hal pelaksanaan pekerjaan belum memiliki inisiatif untuk melakukan pekerjaan karena belum memahami akan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana program yang akan berdampak pada keberhasilan sebuah program. Menurut Edward III dalam Nugroho (2012) mengungkapkan komunikasi berkenaan akan bagaimana kebijakan dikomunikasikan dalam sebuah organisasi atupun publik dan sangat dibutuhkan akan sikap dan tanggapan dari pihak yang terlibat didalamnya. Dari pelaksanaan program ini pula yakni dijalin koodinasi dengan beberapa instansi guna mendapatkan informasi dengan beberapa instansi yakni Badan Statistik Nasional (BSN) dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, koordinasi yang dibangun yakni untuk mengetahui jumlah secara keseluruhan total penduduk, ataupun jumlah total sekolah menengah atas yang ada di Timor Leste yang berhubungan dengan program Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU). Serta koordinasi juga di bangun dengan beberapa institusi non pemerintah terkait dengan pusat pelatihan keterampilan dan perusahaan atau *company*. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:153) mengungkapkan koordinasi dipahami sebagai proses pemanduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit kerja terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. Meskipun koordinasi memiliki peranan sangat penting sangat penting dalam proses implementasi tetapi koordinasi tidak mudah dilakukan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari beberapa informan menjelaskan bahwa koordinasi yang terjalin antara Departemen Orientasi Profesional Dan Pekerjaan dengan beberapa perusahaan dan institusi terkait belum berjalan sesuai dengan diharapkan atau dengan kata lain belum maksimal hal ini dikarenakan suatu pekerjaan yang padat yang menimbulkan *miss contact* dan terjadinya beberapa kendala yang di hadapi oleh pelaksana program bagi beberapa perusahaan ataupun institusi yang terdaftar dalam Divisi Nasional Orientasi Profesional Dan Pekerjaan untuk mengupdate dari sejumlah informasi dari berbagai pihak. Menurut Jening (1998) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:153) mencatat bahwasanya koordinasi akan menjadi lebih sulit ketika unit kerja yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan semakin banyak.

### **Sumber Daya**

Sumber daya dalam sebuah program merupakan suatu aspek yang penting bagi proses implementasi. Dalam Implementasi Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) Di Divisi Nasional Orientasi Profesional Dan Pekerjaan Timor Leste ada beberapa aspek di lihat diamati diantaranya (1) sumber daya manusia, (2) anggaran, (3) sarana dan prasarana. *pertama*, Sumber daya manusia yakni salah satu faktor penting dalam sebuah kacamata organisasi ataupun suatu lembaga

yang mendukung penuh atas pelaksanaan tugas. Tentunya kaitan dalam sumber daya manusia ini harus memiliki suatu ukuran yakni dengan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan suksesnya lembaga pemerintahan ataupun organisasi dalam menjalankan tugas. Berdasarkan sumber data penelitian yang didapat bahwa dalam pelaksanaan Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) Di Divisi Nasional Orientasi Profesional Dan Pekerjaan Timor Leste mengenai sumber daya manusia yakni ketersediaan staf 149 orang yang tersebar di beberapa departemen yang ada dalam divisi dan keahlian atau skill masih sangat kurang hal ini disebabkan pendidikan yang dimiliki oleh pelaksana lebih banyak berpendidikan menengah atas yang tidak sebanding dengan pendidikan yang mempunyai strata satu hal ini berdampak langsung pada pelaksanaan program yang dijalankan Menurut Bank Dunia (1980) dalam Thahir Haning (2015:113) mengungkapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah yang menyangkut aktivitas dalam dunia pendidikan, pelatihan, peningkatan, kemampuan dan pengembangan teknologi. Kaitan dalam pelaksanaan Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja di Departemen Orientasi Profesional dan Pekerjaan yakni mengenai pengembangan ini tentunya terdapat beberapa elemen yang sangat penting yang perlu diperhatikan yakni sebuah pendidikan yang dimiliki oleh seseorang memungkinkan akan kemampuan mereka untuk mengerti apa yang akan menjadi tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tugas. *Kedua*, dalam pelaksanaan kegiatan implementasi tidak terlepas adanya suatu anggaran yang memadai. Mengenai sumber daya anggaran dalam pelaksanaan Program Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) di Departemen Orientasi Profesional dan Pekerjaan Timor Leste merupakan faktor penunjang pelaksanaan kegiatan. Terlihat anggaran yang dialokasikan pada tahun 2014 Pemerintah Timor Leste kepada Sekretariat Negara Urusan Pelatihan Profesional dan Ketanagakerjaan sebesar US\$ 12.193.000 dari anggaran tersebut di alokasikan pada beberapa Divisi dalam proses rencana kerja 1 (satu) tahun. Adapun anggaran yang dikuncurkan untuk pelaksanaan program informasi pasar tenaga kerja di Departemen Orientasi Profesional dan Pekerjaan sebesar US\$ 304.800. Anggaran yang digunakan untuk pembiayaan atas kebutuhan pelaksanaan program. Menurut Widodo (2012) mengungkapkan bahwa dalam efektifitas sumber daya sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, selain dari sumber daya manusia yang terpenting adalah tersedianya anggaran ataupun dana dan peralatan yang di butuhkan guna membiayai pelaksanaan kebijakan. Jelas bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan tanpa adanya tersedianya anggaran memungkinkan pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan berjalan sesuai tujuan yang akan dicapai. *Ketiga*, adanya sarana prasarana, dalam pelaksanaan Program Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) di Departemen Orientasi Profesional dan Pekerjaan Timor Leste sesuai data penelitian dan berdasarkan beberapa informan bahwa penyediaan sarana dan prasarana sangat memadai dalam kebutuhan pelaksanaan program. perlengkapan yang digunakan ialah faktor penunjang dalam tercapainya jalannya implementasi. Dengan tersedianya fasilitas atau perlengkapan lainnya memungkinkan staf atau pelaksana kebijakan menggunakan peralatan yang digunakan dan akan cenderung memahami apa yang harus dilakukan, maka besar kemungkinan pelaksanaan kebijakan sesuai pada tujuan yang dicapai.

### **Disposisi**

Sikap pelaksana atau komitmen dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan secara bersama dan keinginan agar keberhasilan suatu program dapat tercapai. Yang mendasari adanya keinginan dan keemauan yakni sudah menjadi suatu ikrar atau janji dari para pelaksana program. Edward III dalam Nugroho (2012:693) mengungkapkan bahwa *Disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Tentunya dari pelaksana kebijakan harus dilandasi keinginan yang kuat dalam menjalankan pekerjaan. Yang menjadi problema yakni sebagian dari



pelaksana kebijakan menggunakan kuasa sendiri atas kewenangan yang mereka miliki dalam mengimplementasikan kebijakan atau program hal ini disebabkan karena independensi terhadap kebijakan yang mereka buat. Berdasarkan penjelasan penelitian ini dari informan penelitian bahwa mengenai Pelaksana Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) di Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan Timor Leste berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan, bahwa mereka memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan tugas yang mereka lakukan. Walaupun mereka di hambat oleh beberapa staf yang kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas berbanding sedikit dengan yang mempunyai kualifikasi strata satu. akan tetapi ini bukan salah satu faktor penyebab. Komunikasi yang mereka jalankan secara bersama-sama guna suksesnya program yang dijalankan. Para pelaksana program sistem informasi pasar tenaga kerja selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja. Sesuai apa yang diungkapkan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2012:151) bahwa komitmen merujuk pada kesungguhan seorang personel untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan sungguh-sungguh, memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk menjalankan tugasnya tersebut dengan menggunakan segala potensi yang dimilikinya untuk mencapai hasil. sebagaimana dibebankan oleh organisasi terhadap personel.

### **Struktur Birokrasi**

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik atau program yang memegang peranan sangat penting yakni struktur birokrasi. Adanya birokrasi sejauh ini memiliki kewenangan dan mempunyai dominan yang tinggi ketimbang organisasi yang lain. Hal ini pula disebabkan bahwa birokrasi itu menjadi tulang punggung bagi keberhasilan terhadap tujuan suatu kebijakan. Birokrasi suatu alternatif yang sangat penting dalam rangka memecahkan problema dalam kehidupan sosial. Ketetapan dan ketercukupan unsur-unsur berkaitan terbentuknya kapasitas organisasi sangat mempengaruhi kualitas organisasi tersebut. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:130) agar semua unsur dapat berjalan dengan baik, yang pada gilirannya mendorong keberhasilan organisasi maka diperlukan wadah kerjasama. Wadah kerjasama dari berbagai unsur organisasi dalam rangka mencapai tujuan implementasi kebijakan yakni struktur birokrasi. Dalam kegiatan implementasi kebijakan, struktur organisasi merupakan suatu wadah ataupun wahana interaksi para petugas atau staf birokrasi yang berwenang mengelola dan melaksanakan kebijakan dalam berbagai hal kegiatan. Olehnya itu dapat dikatakan bahwa struktur birokrasi serangkaian kegiatan yang sifatnya fundamental dalam melaksanakan kebijakan dan penyederhanaan kerja yang dan melakukan pembagian wewenang kerja di beberapa anggota pegawai/ staf untuk mencapai misi organisasi. Menurut Edward III yang dikutip Agustino (2014:153) mengungkapkan bahwa : Kinerja suatu birokrasi/organisasi kearah lebih baik adalah dengan melakukan *standart operating prosedures* (SOP) dan melaksanakan fragmentasi. SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratut/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan penetapan standar opsional prosedur memungkinkan pekerjaan lebih profesional dimana menyangkut mekanisme kerja atau bahkan pada pembagian wewenang tugas serta tanggung jawab di semua para pelaksana kebijakan atau progam.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa informan bahwa pada Pelaksana Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) di Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan Timor Leste bahwasanya jalannya program belum mempunyai ketetapan yakni standar operasional prosedur dimana hal ini yang menjadi acuan atau patokan menilai keberhasilan suatu program. Dengan demikian pula akan mengakibatkan suatu kesulitan menentukan keberhasilan akan program yang dijalankan. Akan tetapi dalam pelaksanaan program selalu dilakukan koordinasi dan pengawasan.

Adapun capaian dari standar pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat dari ketetapan capaian kinerja dalam setahun yakni rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dan jika target yang ditetapkan dalam jangka pendek belum tercapai maka tentu dilanjutkan pada rencana jangka menengah dan seterusnya. Disisi lain, pada pelaksanaan Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) di Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan Timor Leste ini akan dijalankan secara rutin dalam dan merupakan sebuah program tahunan walaupun masih ada beberapa aspek yang perlu di kaji terutama berkaitan dengan kemampuan dan skill para pelaksana program serta komunikasi yang dijalankan dengan berbagai instansi. Untuk itu dalam mengoptimalkan terhadap pelaksanaan program ini, tentunya perlu dilakukan suatu evaluasi dari berbagai tahapan-tahapan agar pelaksanaan program dapat dilihat secara detail dan urgen.

### **Faktor Pendukung Implementasi Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) di Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan Timor Leste**

#### **Sumber Daya Finansial Atau Anggaran Memadai**

Dalam proses pelaksanaan implementasi program sebagai faktor penunjang untuk tercapainya program yakni adanya ketersediaan anggaran yang memadai. Anggaran suatu hal penting yang memotivasi semua kegiatan terhadap suatu program. Menurut Tahir (2014) mengungkapkan bahwa dana/anggaran untuk membiayai operasionalisasi dalam proses pelaksanaan kebijakan Anggaran ini menyakuti biaya yang akan dikeluarkan untuk keperluan proses kegiatan yang berjalan. Sedangkan menurut Cardoso Gomes (1995) mengungkapkan bahwa anggaran suatu aktivitas organisasi atau mencapai tujuan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas dan tujuan tersebut. Berdasarkan penelitian dan beberapa penjelasan informan sebelumnya bahwa dengan besarnya anggaran demi kelangsungan pelaksanaan kegiatan dari tugas pokok dan fungsi di Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan yang tiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah anggaran termasuk alokasi anggaran untuk departemen orientasi profesional dan pekerjaan dalam mengimplementasikan program sistem informasi tenaga kerja (SIMU).

#### **Adanya Kesiapan dan Komitmen dari Para Implementor Program**

Dalam melaksanakan suatu kegiatan tidak terlepas adanya dorongan dengan yang kuat hal ini karena didasari komitmen yang dimiliki. Komitmen merupakan kemampuan serta kemauan untuk menyesuaikan sikap pribadi dengan suatu kebutuhan, sebagai prioritas terhadap tujuan organisasi. menurut Sutrisno (2008:292) menyatakan bahwa komitmen merupakan keinginan yang kuat untuk menjadi anggota dalam suatu kelompok, kemauan, usaha yang tinggi untuk organisasi, serta suatu keyakinan tertentu dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Adanya komitmen yang cukup tinggi dari para pelaksana yakni para staf dan untuk melaksanakan program sistem informasi tenaga kerja (SIMU) dalam melaksanakan tugas berusaha saling membantu satu sama lain. Berdasarkan data penelitian dan berbagai informan menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan program "SIMU" ini dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kesadaran maupun komitmen dari para implementor dalam hal ini pegawai departemen orientasi profesional dan pekerjaan. Komitmen akan muncul ketika seseorang personel menganggap bahwa pencapaian tujuan organisasi dihayati sebagai tujuan pribadinya sehingga keberhasilan dan kegagalan mencapai tujuan dari organisasi menjadi kegagalan dan keberhasilan dirinya.

### **Adanya Sarana dan Prasarana**

Dalam pelaksanaan kebijakan/program tidak terlepas akan cakupan sarana dan prasana yang memujudkan untuk berjalannya secara simultan dalam pelaksanaan kebijakan/program yang dijalankan. Menurut Abdul Wahab (2011) mengungkapkan bahwa untuk menjamin tingkat keberhasilan kebijakan dapat diterjemahkan secara detail terhadap rangkaian kegiatan secara teknis yakni berupa peyediaan fasilitas-fasilitas mulai dari primer hingga tertier dan sarana transportasi. Berdasarkan beberapa penejelasan informan dan data penelitian bahwa keberadaan sarana dan prasarana pada departemen orientasi profesional dan pekerjaan sudah memadai hal ini terlihat dari beberapa jumlah inventaris termasuk bantuan dari pada donatur, dalam pelaksanaan program sistem informasi tenaga kerja (SIMU) yang memerlukan sarana dan prasarana seperti komputer dengan segala perangkatnya, serta ketersediaan alat transportasi yang cukup memadai sebab tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu pelaksanaan kegiatan program ini akan terhambat.

### **Faktor Penghambat Implementasi Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) di Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan Timor Leste Koordinasi Belum Berjalan Dengan Baik**

Pada pelaksanaan kebijakan tentu tidak terlepas akan kerjasama antara aktor ataupun *stakeholder* yang dibangun. Agar koordinasi dapat dilaksanakan dengan baik jika seluruh pelaksana program, utamanya penganggung jawab implementasi perlu memahami kegiatan yang akan dijalankan. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012) Dalam proses implementasi akan lebih baik jika menggunakan mekanisme kerja atau koordinasi yang sifatnya dalam proses pelaksanaan kebijakan dapat melibatkan organisasi/departemen/lembaga/dinas dengan satu kelompok sasaran tertentu. Sesuai data penelitian dan hasil wawancara bahwasanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program sistem informasi pasar tenaga kerja (SIMU) yang di jalankan yakni koordinasi antar instansi yang kurang berjalan dengan maksimal dalam pemberian informasi yang diterima oleh Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan Timor Leste dengan beberapa Instansi lain mengenai jumlah total penduduk yang tidak bekerja (Pengangguran). Koordinasi yang dilakukan para implementor dalam program sistem informasi pasar tenaga kerja (SIMU), belum berjalan sesuai yang diharapkan karena para implementor ini tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk mencari dan mengupdate informasi dari perusahaan/institusi yang bersangkutan dengan menghubungi langsung via telepon maupun mendatangi langsung ke perusahaan/institusi yang bersangkutan sehingga tidak perlu menunggu untuk dihubungi oleh yang bersangkutan karena kita yang memerlukan informasi tersebut maka harus lebih aktif sehingga informasi/data yang diinginkan dapat terpenuhi pada waktu yang ditentukan.

### **Kualitas dan Kuantitas dari Implementor Program Belum Memadai**

Sumber daya manusia merupakan dimensi dalam proses pelaksanaan kebijakan. Aspek kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan sebuah program sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan. Menurut Thahir Haning (2015:118) sumber daya manusia akan berhasil jika pengenalan tugas-tugas awal dilakukan secara benar dan tepat sasaran, maka pendidikan dan pelatihan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja sumber daya manusia aparatur, menunjang pencapaian tujuan institusi, dan meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan wawancara penelitian bawah bahwa tingkat pendidikan di departemen orientasi profesional dan pekerjaan didominasi oleh tingkat sekolah menengah atas (SMA) yang mana daya tangkap dan daya nalar terhadap pekerjaan yang diberikan tersebut minim sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan yang relevan dengan pekerjaan yang dilakukannya dalam program “SIMU” ini sehingga dapat mengurangi distorsi dalam pencapaian tujuan daripada program tersebut.



### **Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Salah satu keberhasilan program yang akan dilaksanakan dapat dilihat dari adanya standar operasional prosedur, untuk dapat mengukur dari keberhasilan dalam merealisasikan tujuan program yang akan dicapai tersebut. Akan tetapi berdasarkan data penelitian dan beberapa informan bahwa dalam program sistem informasi pasar tenaga kerja (SIMU) di Divisi Nasional Orientasi Profesional dan Pekerjaan Timor Leste belum mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga pelaksanaan Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) yang mengindikasikan program yang dijalankan belum maksimal. Menurut Widodo (2012:108) mengungkapkan kejelasan substansi kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kebijakan, semakin mudah para pelaku kebijakan bersikap menerima, tidak mau tahu, atau menolak kehadiran kebijakan sehingga mendorong munculnya disposisi seseorang untuk melaksanakan kebijakan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) merupakan aplikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Tujuan dari program ini adalah meminimalisir tingkat pengangguran yang kian tahun kian meningkat dengan menyalurkan para calon tenaga kerja pada pusat-pusat pelatihan keterampilan dan juga perusahaan/institusi yang membutuhkan tenaga kerja dimana target di tahun 2014 untuk yang mendapatkan kursus keterampilan sebanyak 1000 orang untuk berbagai bidang pelatihan sedangkan target untuk yang mendapatkan pekerjaan sebanyak 1000 orang yang dapat tersalurkan pada perusahaan/institusi.
2. Secara umum dapat dijelaskan bahwa implementasi Program Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja (SIMU) belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan daripada program yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Sebuah komunikasi yang baik akan membawa perubahan dalam sebuah program yang dijalankan kearah pencapaian tujuan yang diharapkan namun dalam kenyataannya didalam implementasi program "SIMU" komunikasi yang dilakukan belum terlaksana secara efektif.
4. Hal penting dalam pengimplementasian program "SIMU" adalah sumber daya dimana sumber daya finansial tidak menjadi kendala/hambatan karena masalah anggarannya sudah sangat cukup namun untuk masalah sumber daya manusia yang masih kurang baik itu dalam hal kuantitas maupun kualitas sehingga sangat mempengaruhi dalam pengimplementasian Program "SIMU".
5. Sikap daripada para implementor Program "SIMU" menunjukkan komitmen yang tinggi walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
6. Belum adanya standar yang jelas seperti *Standard Operating Procedures (SOP)*, standar yang digunakan berupa Planu Trimestral, Planu Seismestral dan Planu Annual dimana terdapat target yang ingin dicapai dalam Program "SIMU".
7. Koordinasi yang dijalankan oleh para implementor dengan institusi-institusi/perusahaan belum berjalan secara maksimal.

### **SARAN**

1. Agar pengimplementasian Program "SIMU" ini berjalan secara optimal maka hal yang perlu diperhatikan adalah perlu dibuatnya peraturan tentang kegunaan kartu evidensial yang mengharuskan para penerima tenaga kerja (institusi/perusahaan) untuk melaporkan pada saat perekrutan tenaga kerja maupun pemberhentian tenaga kerja.

2. Komunikasi yang dijalankan antara pimpinan Divisi, kepala departemen, kepala penanggung jawab program dan para implementor program dalam hal ini staff di Departemen Orientasi Profesional dan Pekerjaan harus dilakukan secara intensif mengingat daya tangkap dan daya pikirnya antara penanggung jawab program dan pelaksana program.
3. Perlu dibuat standar kerja yang jelas berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Tolak ukur untuk keberhasilan dari implementasi Program “SIMU”.
4. Untuk masalah Sumber Daya Manusia perlu ditambah kuantitas/jumlahnya mengingat volume kerja yang harus dilakukan dalam pengimplementasikan program ini memerlukan pegawai yang cukup untuk mengimbangi pekerjaan yang banyak dan rumit.
5. Untuk masalah perekrutan dan penempatan pegawai perlu diperhatikan juga masalah tingkat pendidikan agar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya yang dalam bahasa inggrisnya ada istilah “*The Right Man in The Right Place*”
6. Koordinasi yang dilakukan antara ministerial maupun antar sektoral perlu ditingkatkan dalam hal keterlibatan secara langsung institusi/perusahaan dalam rapat kerja yang membahas mengenai implementasi Program “SIMU”.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahad, Solichin. 2011. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Bumi Aksara. Jakarta
- Cardoso Gomes, Faustino. (1995). Manajemen Sumber Daya Manusia. Andi Offset. Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.
- Nugroho, Riant, 2012. Cet.ke-4, *Public Policy*, Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Muatiarin, Dyah dan Zaenudin, Arif. 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis Milles and Huberman*. Arizona State University. Sage
- Sutrisno. 2008. Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta : EKONISIA
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Thahir Haning, Mohammad. 2015. Reformasi Birokrasi : Desain Organisasi yang Mendukung Pelayanan Publik di Indonesia. Penerbit : Ilmu Giri Yogyakarta
- Widodo, Joko. 2012. Analisa Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisa Proses Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing. Malang.
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Penerbit CAPS (*Center of Academic Publishing Service*). Yogyakarta.
- Zauhar, Soesilo. 2012. Reformasi Administrasi Konsep, Dimensi dan Strategi. PT. Bumi Aksara. Jakarta.